



**BUPATI NIAS SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN  
NOMOR            TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Nias Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.503.701.148.628,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.604.922.849,00 yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.486.954.849,00
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 310.605.800,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.266.900.000,00
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.540.462.200,00

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.486.954.850,00 yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak reklame ;
  - d. Pajak penerangan jalan;
  - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);  
dan
  - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.850.000,00
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.513.116.021,00
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 493.447.510,00
- (5) Pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.895.541.318,00
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00

## Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.310.605.800,00 yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum
  - b. Retribusi jasa usaha
  - c. Retribusi perizinan tertentu
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.104.000.000,00
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.191.605.800,00
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00

## Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.266.900.000,00 terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.6.266.900.000,00.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.540.462.200,00 terdiri atas:
  - a. Jasa giro
  - b. Pendapatan denda retribusi daerah
  - c. Pendapatan dari pengembalian
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.430.612.200,00
- (3) Pendapatan dari denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00
- (4) Pendapatan denda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.850.000,00.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.467.596.225.779,00 yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.425.596.225.779,00
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.000.000.000

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.425.596.225.779,00 yang terdiri atas :
  - a. Dana Dana Perimbangan;
  - b. Dana Desa; dan
  - c. Dana Desa
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.035.358.063.779,00
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.390.238.162.000,00.

#### Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.42.000.000.000,00.

#### Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000,00 yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.500.000.000,00

#### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.517.701.348.628,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.813.737.438.753,00 yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.558.854.169,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 240.723.914.169,00
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.939.394.200,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.130.965.334.215,00
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.549.942.000,00

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.558.854.169,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 314.819.178.536,00
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.826.619.546,00
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.371.667.199,00
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.392.178.000,00
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.183.640.690,00
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.571.285.073,00

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.240.723.914.169,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang ;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan
  - d. Belana perjalanan dinas
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.691.363.487,00
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.884.794.198,00
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.002.196.253,00
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.911.392.231,00
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.234.168.000,00

#### Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 939.394.200,00 yang terdiri dari belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.79.223.170.000,00 yang terdiri dari :



- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. Belanja hibah dana BOS;
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. Belanja hibah dana BOSP;
- (2) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.006.164.215,00
  - (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.146.170.000,00
  - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,00
  - (5) Belanja hibah dan BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.513.000.000,00

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.549.942.000 yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp.5.549.942.000,00.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.238.633.983.710,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.798.010.325,00
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.961.358.335,00
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.984.399.200,00
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.570.215.850,00
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 320.000.000,00

#### Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.772.084.000,00, yang terdiri dari belanja tidak terduga sebesar Rp.7.772.084.000,00.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 457.557.842.165,00 yang terdiri dari:
  - a. Belanja bagi hasil;
  - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.987.256.065,00 untuk belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.456.570.586.100,00 untuk belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

#### Pasal 23

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.14.000.200.000 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 24

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp.19.000.200.000,00 yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 25

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00

#### Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.14.000.200.000,00
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.14.000.200.000

#### Pasal 27

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

#### Pasal 28

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Peraturan Bupati Nias Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal September 2023

BUPATI NIAS SELATAN,

**HILARIUS DUHA**



**KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>19.604.922.849</b>
4.1.01	Pajak Daerah	9.486.954.849
4.1.01.06	Pajak Hotel	234.850.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	234.850.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	234.850.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.513.116.021
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.442.448.021
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.442.448.021
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	70.668.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	70.668.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	493.447.510
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	493.447.510
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	493.447.510
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.000.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	895.541.318
4.1.01.15.01	PBBP2	895.541.318
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	895.541.318
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	350.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	350.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	310.605.800
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	104.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	94.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	6.500.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	87.500.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	191.605.800

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	131.605.800
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	131.605.800
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.266.900.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.266.900.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.266.900.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.266.900.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.540.462.200
4.1.04.05	Jasa Giro	3.430.612.200
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.430.612.200
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.430.612.200
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	75.000.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	75.000.000
4.1.04.13.02.0018	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	75.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	34.850.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	34.850.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	34.850.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.467.596.225.779</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.425.596.225.779
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.035.358.063.779
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.258.106.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.650.805.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.584.871.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	272.084.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	27.422.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.140.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.457.361.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	796.062.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.388.361.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	646.287.245.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	382.524.376.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	61.996.320.000
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	117.661.747.000
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	53.315.829.000
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	30.388.973.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157.402.332.779
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	318.965.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	24.259.527.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.827.296.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.731.968.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.138.763.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	32.525.656.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	15.132.336.779
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.921.788.000
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	7.539.032.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.096.932.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	38.910.165.000
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	11.999.904.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	213.410.380.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	69.096.170.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.050.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.887.405.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.221.901.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	34.976.974.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.871.120.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	641.880.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.514.603.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.555.116.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	37.387.035.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	457.770.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	988.306.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	532.100.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	230.000.000
4.2.01.05	Dana Desa	390.238.162.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	390.238.162.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	390.238.162.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.881.768.175
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.165.459.886
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.542.024.967
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	125.693.511
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.285.053.461
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.500.000.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.503.701.148.628</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>813.737.438.753</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	435.558.854.169
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	314.819.178.536
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	218.534.528.322
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	176.176.842.250
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.357.686.072
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.833.937.940
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.682.983.801
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.150.954.139
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.499.068.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.499.068.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.353.473.680
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.961.957.600
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.391.516.080
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.391.968.027
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.043.067.250
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.348.900.777
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.919.343.129
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.938.327.434
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.981.015.695
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	57.000.428

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	57.000.428
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.020.939.098
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.559.341
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.018.379.757
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.215.750.508
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.357.050.019
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.858.700.489
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.507.639.597
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	397.596.423
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.110.043.174
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.485.529.307
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.190.386.513
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.295.142.794
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	31.826.619.546
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	30.460.919.546
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	30.460.919.546
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.365.700.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.365.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.371.667.199
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	27.887.405.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	27.887.405.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	34.976.974.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	34.976.974.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.221.901.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.221.901.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.285.387.199
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.722.927.599
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	487.459.600
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	75.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.786.463.125
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.109.885.125
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.109.885.125
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	102.000.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	102.000.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.600.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.600.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.400.000



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.400.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	140.840.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	140.840.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.146.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.146.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	761.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	761.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	351.400.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	351.400.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.684.000.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	150.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	75.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	75.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.384.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.174.880.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.174.880.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	183.640.690
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.594.396
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.594.396
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.810.240
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.810.240
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.142.400
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.142.400
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.379.962
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.379.962
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	711.653
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	711.653
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.700
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.700
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.434.246
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.434.246
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	141.523
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	141.523
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	424.570
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	424.570

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	571.285.073
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	171.285.073
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	171.285.073
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.723.914.169
5.1.02.01	Belanja Barang	64.691.363.487
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.077.145.539
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	376.223.806
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.750.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.488.302.900
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	300.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	202.092.710
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.316.608.310
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	79.014.240
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.371.392.634
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.231.181.260
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	470.302.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	504.529.070
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.742.292
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	100.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	511.538.260
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.462.454.648
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.718.490.905
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.422.051.314
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.926.014.840
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	135.481.050
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.800.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	153.607.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	33.232.500
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.885.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	91.576.800
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	105.924.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	49.950.000
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.614.217.948
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	102.120.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0043	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	13.099.836.000
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	844.405
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	33.763.887
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	191.567.614
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.140
5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2.760.000
5.1.02.01.04.0131	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	28.643.352
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	154.626.550
5.1.02.02	Belanja Jasa	124.884.794.198
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.773.338.210
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	729.900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	361.100.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.335.438.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.200.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.684.960.600
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	394.800.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	34.755.130.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	216.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	309.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	133.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.424.100.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.390.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.980.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.512.980.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	878.700.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.093.400.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	216.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	104.400.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	32.585.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	120.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.504.300.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	69.214.690
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	81.360.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.116.526.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	32.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.584.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	289.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.101.363.920
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	180.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	650.000.000
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	650.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	642.067.520
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	116.550.000
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	14.220.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	61.200.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	66.600.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.500.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	141.060.000
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	26.250.000
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	26.267.520
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	188.420.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.275.900.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	50.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.907.100.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	263.800.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	313.575.000
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	142.075.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	16.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	155.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.229.913.468
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	50.137.266.468
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	82.647.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.002.196.253
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.272.440.893

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	167.562.800
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	33.000.400
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.894.629.400
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	343.997.821
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	215.639.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.657.672
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	113.923.600
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	100.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	70.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	330.030.200
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.329.755.360
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempati Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.329.755.360
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	400.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.911.392.231
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.911.392.231
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.347.972.231
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.563.420.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.234.168.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.052.540.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.600.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.038.940.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	181.628.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	181.628.000
5.1.04	Belanja Subsidi	939.394.200
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	939.394.200
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	939.394.200
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	939.394.200
5.1.05	Belanja Hibah	130.965.334.215
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.006.164.215
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.976.164.215
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.976.164.215
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	72.146.170.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	66.503.110.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	66.503.110.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.643.060.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.643.060.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	6.513.000.000
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.871.120.000
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.871.120.000
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	641.880.000
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	641.880.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.549.942.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.549.942.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.549.942.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.549.942.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>238.633.983.710</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.798.010.325
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.008.171.600
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.000.000.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	5.000.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	8.171.600
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	8.171.600
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.422.800.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.422.800.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	722.800.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	700.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.748.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.748.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.748.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.395.020.568
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	169.563.488
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.051.600

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	166.511.888
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.083.441.779
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.048.357.102
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	118.475.177
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	916.609.500
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	142.015.301
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	32.156.300
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	82.485.200
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	27.373.801
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	31.967.500
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	31.967.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	31.967.500
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	44.329.998.932
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	44.329.998.932
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	44.329.998.932
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.500.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.500.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.500.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.104.303.725
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	904.102.780
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	904.102.780
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	200.200.945
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	200.200.945
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.961.358.335
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	85.818.078.335
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	85.818.078.335
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.305.190.335
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.707.100.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	62.405.788.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	400.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	143.280.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	143.280.000
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	143.280.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.984.399.200
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	59.259.731.515
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.759.731.515
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	47.759.731.515

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.500.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11.500.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	25.724.667.685
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.300.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	11.300.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.424.667.685
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	13.424.667.685
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.000.000.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.000.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.000.000.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	7.000.000.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	7.000.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	570.215.850
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	570.215.850
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	570.215.850
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	570.215.850
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	320.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	320.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	320.000.000
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	320.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.772.084.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.772.084.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.772.084.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.772.084.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.772.084.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>457.557.842.165</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	987.256.065
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	987.256.065
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	987.256.065
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	987.256.065
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	456.570.586.100
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	456.570.586.100
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	456.570.586.100
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	456.570.586.100
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.517.701.348.628</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-14.000.200.000</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>19.000.200.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.000.200.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	19.000.200.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	19.000.200.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	19.000.200.000
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>14.000.200.000</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

Kab. Nias Selatan, .....

Bupati

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH